

**IDENTITAS KEPOLISIAN
(SUATU PENDEKATAN MANAGERIAL)**

*Oleh : Hadisapoetro **

(bagian pertama)

Salah satu fungsi yang terpenting dari pendidikan tinggi dalam lingkungan kedinasan adalah untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan (leadership). Demikian pula adanya dengan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) sebagai salah satu pendidikan tinggi dari Kepolisian RI. Dalam realitasnya lulusan PTIK memang menduduki jabatan – jabatan kepemimpinan pada tingkatan eselon atas, menengah dan eselon pelaksana, sesuai dengan tingkat kepangkatannya masing-masing.

Peranan seorang Pemimpin (Manager) dalam suatu Lembaga, baik Lembaga Pemerintah maupun Non-Pemerintah, pada hakekatnya adalah sama, yaitu menciptakan kondisi di lingkungan kerjanya yang bisa menjamin keberhasilan pencapaian tujuan lembaga yang dipimpinya. Ia harus bisa meningkatkan produktivitas masing-masing anggota dan produktivitas unit-unit kelompok kerja, sehingga tercapai efektifitas lembaganya. Hal ini lebih-lebih berlaku untuk lembaga kepolisian, yang karena sifat tugasnya memang disyaratkan untuk efektif. Salah satu aspek dari lingkungan tugas yang kondisional untuk itu adalah pengenalan dan penghayatan tentang *Identitas Kepolisian*, serta penampilannya secara benar oleh setiap anggota.

Uraian di bawah ini adalah usaha untuk menganalisa dalam garis besarnya proses pertumbuhan identitas Polri dalam sejarahnya, faktor-faktor yang menentukannya, serta unsur-unsur tertentu yang perlu ditonjolkan, yang dapat mendukung efektifitas Polri

* Bapak Hadisapoetro adalah Wakil Dekan PTIK. Naskah ini adalah bagian dari pidato Perayaan Hari jadi ke 36 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tanggal 17 Juni 1982.

dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan manegerial dalam pengenalan identitas kepolisian ini tentu tidak akan bisa membatasi diri untuk tidak menyoroti faktor-faktor lain yang tumbuh dalam organisasi, yang akan mempengaruhi penampilan identitas tersebut.

Istilah "identitas" di kalangan Polri sudah lama dikenal, akan tetapi perhatian terhadapnya mulai tumbuh sejak pengintegrasian Polri di dalam ABRI dengan adanya TAP MPRS II/1960 tanggal 3 Desember 1960, di mana dinyatakan, bahwa Angkatan Bersenjata RI terdiri dari Angkatan Perang RI dan Polisi Negara. Terdapat sementara anggota kepolisian yang menginginkan adanya integrasi penuh tetapi dengan tetap memiliki identitasnya ("Integrasi met behoud van eigen identitas"), sampai-sampai organisasi Persatuan Pegawai Polisi (P3.RI) dalam kongresnya tahun 1962 merubah namanya menjadi Persatuan Anggota Angkatan Kepolisian RI (PAAKRI), meskipun istilah Angkatan Kepolisian RI (AKRI) baru secara formal dipakai pada tahun 1964 dengan adanya Keppres No. 290/1964. Pengintegrasian penuh ini dilanjutkan dengan berturut-turut keluarnya Penpres No. 3/1965 dan Keppres No. 116/1965, yang menetapkan berlakunya Hukum Disiplin Tentara dan Saptamarga kepada Kepolisian RI. Namun TAP MPRS No. XXIV/1966 menentukan adanya perbedaan antara masing-masing Angkatan berdasarkan "matranya", di mana untuk Kepolisian dirumuskan matranya sebagai: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Penegasan perbedaan antara APRI dan Kepolisian lebih ditegaskan lagi dengan keluarnya Keppres No. 52/1969, di mana sebutan untuk kepolisian dikembalikan menjadi Kepolisian RI (Polri) dalam rangka normalisasi dan fungsionalisasi semua aparatur Pemerintah. Dalam rangka menguraikan adanya hal-hal yang membedakan Polri dari aparat Pemerintah lainnya, Soenito Djojosoegito (Komisaris Besar Polisi Purnawirawan), dalam terbitannya: *Manual Pokok-pokok Pelaksanaan Tugas Kepolisian RI*, memakai istilah-istilah: Kepribadian Bhayangkara dan Identitas Kepribadian Polri, untuk menunjukkan ciri khas Polri sebagai penegak hukum dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. M. Karjadi dalam bukunya *Polisi, Filsafat Dan Perkembangan Hukumnya*, juga memakai istilah Identitas kepolisian yang disinonimkan dengan Corak Kepribadian

Kepolisian.

Demikianlah perkembangan istilah *Identitas Kepolisian*, istilah mana pasti telah dikenal oleh semua anggota Polri, tetapi mungkin dengan pengertian yang berbeda-beda.

Istilah "identitas" biasanya diberi arti: ciri-ciri yang terdapat pada sesuatu, yang membedakannya dari yang lain, atau ciri-ciri yang terdapat pada sesuatu untuk mengenalnya. Dalam kepolisian pengertian yang terakhir ini dipakai untuk menentukan ciri-ciri yang terdapat pada benda atau seseorang untuk kepentingan penyidikan perkara. Pemakaian istilah identifikasi dan pemberian artinya di sini jelas dikaitkan dengan hal-hal yang nampak, atau aspek fisik dari suatu benda atau seseorang. Dalam lingkup pengertian ini mestinya pemakaian istilah "Identitas Polisi" harus diartikan: aspek-aspek fisik yang nampak pada Polisi, yang membedakannya dari aparat pemerintahan lainnya. Pengertian ini memang mengandung kebenaran, namun kurang lengkap karena mengabaikan aspek-aspek lainnya dari benda atau orang yang tidak nampak secara fisik.

Dalam kepustakaan kepolisian dari dunia Barat, tidak dipakai istilah: *Police Identity*. Istilah *Identity* dan *Identification* selalu dikaitkan dengan kegiatan penyidikan. Untuk menunjukkan adanya ciri-ciri yang karakteristik yang terdapat pada kepolisian, dipakai beberapa istilah, antara lain yang terkenal adalah *Police Personality* dan *Police Profile*.

Jerome H. Scolnick memakai istilah "*Police Working Personality*" untuk menunjukkan ciri-ciri khas dari kepolisian, ialah timbulnya "personality" atau kepribadian kepolisian yang tumbuh karena sifat-sifat lingkungan tugas yang dihadapi, ialah terdapatnya kewenangan kepolisian yang khas dan tugas yang selalu menghadapi bahaya. Proses sosialisasi dengan sifat lingkungan tugas tersebut menimbulkan kultur kepolisian yang ditandai dengan terdapatnya sifat-sifat seperti: curiga, otoriter, cynis, isolasi diri, kerahasiaan, solidaritas kelompok, introvert dan lain-lain lagi. Dan sifat-sifat ini akan nampak pada sikap dan tindakan anggotanya, baik di dalam maupun di luar tugas resminya. Penggunaan istilah *Police Personality* oleh Richard Bennet dalam arti: "Value orientation specific to law enforce-

ment officers" adalah mirip sekali dengan pengetrapan teori sosialisasi dalam pembentukan kepribadian kepolisian seperti diuraikan oleh Skolnick. Ia menolak kebenaran teori "Pre-disposisi" yang dikembangkan oleh Rokeach, yang menyatakan, bahwa kepribadian dalam suatu lingkungan kerja, akan lebih ditentukan oleh sifat-sifat orang yang dibawanya sebelum ia memasuki lingkungan tersebut.

Jelas "Police Personality" di sini dipakai untuk menunjukkan ciri-ciri khas kejiwaan atau kepribadian kepolisian, dengan penegean kepribadian yang ditumbuhkan oleh lingkungan pekerjaannya, yang secara nyata (factual) berlaku di kalangan kepolisian.

Istilah "Police Profile" antara lain dipakai oleh Harlan Hahn untuk menunjukkan sifat khas kepolisian, akan tetapi juga sama dalam pengertian kejiwaan, meskipun ia memakai istilah "profile" yang sepintas menunjukkan kepada sifat-sifat lahiriahnya.

Agak berlainan dengan pendapat penulis-penulis tersebut di atas, Arthur Nierderhoffer menyatakan, bahwa kekhasan kepolisian juga terlihat pada penampilan fisiknya seperti pakaian dan senjatanya, di samping tentang munculnya "value orientation"-nya yang khas sependapat dengan penulis lainnya.

Dengan mengambil contoh beberapa pendapat beberapa penulis tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa menurut pengertian mereka, ciri khas kepolisian tercermin pada personality atau kepribadian yang berlaku secara nyata (factual) di kalangannya, yang ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan pekerjaannya, dan kepribadian tersebutlah yang membedakan anggota kepolisian dengan warga masyarakat lainnya. Maka tidak mengherankan, bahwa dengan pengertian ini dianggapnya selalu ada "value gap" antara Polisi dan masyarakat, yang menempatkan Polisi dalam posisi yang tidak menguntungkan di mata masyarakat.

Di samping itu secara tidak tegas juga digambarkan, bahwa kepribadian yang tumbuh tersebut akan nampak pada sikap dan tindakannya, atau penampilan secara fisik dari kepribadian di samping oleh Nierderhoffer juga diidentifikasi adanya lambang-lambang fisik khas kepolisian, seperti pakaian seragamnya dan senjatanya. Maka dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut, bahwa ciri-ciri khas kepolisian, atau dengan istilah kita identitas kepolisi-

an, mempunyai 2 aspek, ialah:

1. Aspek kejiwaan (psikis, batiniah), ialah kepribadian.
2. Aspek badaniah (fisik, wajah), ialah penampilannya, di mana terdapat interaksi antara kedua aspek tersebut yang terjelma dalam sikap dan tindakannya secara nyata sehari-harinya. Jelas di sini identitas kepolisian dianalisa secara empiris, dengan melihat kenyataan-kenyataan dan pengalaman-pengalaman yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana kita mengartikan identitas kepolisian.

Apabila dalam uraian di atas banyak berpusat pada istilah "personality" atau kepribadian, maka perlu diberikan arti yang jelas, yang akan dipakai selanjutnya dalam penyajian ini. Sebagai pangkal tolak akan dipakai definisi yang dikemukakan oleh seorang psycholoog paling terkemuka ialah Freud, yang menyatakan, bahwa kepribadian adalah: "A dynamical system of psychological energy", yang dapat diterjemahkan sebagai: sistim yang dinamis dari kekuatan/enersi psychologis. Kepribadian mengandung suatu sistim dinamis dalam kejiwaan yang menjadi daya penggerak manusia. Dalam pengertian yang hampir sama, Robert Sheehan memberikan definisi: "Outward manifestation of inner self", suatu perwujudan keluar dari apa yang ada di dalam dirinya. Soerjono Soekanto mengartikan kepribadian sebagai: organisasi dari faktor-faktor biologis, psychologis dan sosiologis yang mendasari perikelakuan manusia. Semua definisi yang diutarakan di atas mengkaitkan segi kejiwaan dengan tingkah laku manusia, baik sebagai penggerak ataupun manifestasinya. Dalam naskah ini kepribadian diberi arti yang terbatas pada segi kejiwaan, seperti yang dipakai oleh Paul Whisenand yang menyatakan, bahwa kepribadian adalah: "Suatu penyusunan yang hierarchis dari kecenderungan (attitudes), kebutuhan (needs), bakat (predispositions) dan nilai-nilai (value) yang khas terdapat pada seseorang atau yang secara populer sama dengan: sifat-sifat seseorang atau sistim nilainya.

Dalam menganalisa identitas kepolisian saya sependapat, bahwa identitas tersebut mengandung 2 aspek, ialah aspek kejiwaan atau kepribadiannya, dan aspek pisik yang nampak pada penam-

pilan serta sikap dan tindakannya. Akan tetapi saya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan kepribadian kepolisian adalah sifat-sifat kejiwaannya atau sistim nilainya yang seharusnya ada sebagai sistim nilai yang disyaratkan oleh sifat pekerjaannya, dan bukan sistim nilai yang tumbuh dan nyata berlaku akibat dari sifat pekerjaan. Saya artikan kepribadian kepolisian sebagai sistim nilai yang normatip. Maka secara asumptip dapat dikemukakan bahwa:

Identitas Kepolisian adalah ciri-ciri khas yang nampak pada penampilannya, yang dijiwai oleh sistim nilai yang berlaku secara normatip karena persyaratan lingkungan tugasnya.

Kita bisa membicarakan identitas kepolisian suatu negara, untuk membedakannya dengan kepolisian negara lain. Setiap negara mempunyai aparat kepolisian yang pasti berbeda dengan kepolisian negara lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terdapat dalam masing-masing lingkungannya yang sangat berlainan, antara lain:

1. Negara di mana Polisi itu berfungsi, baik yang mengenai falsafahnya, konstitusinya, peranan dan wewenang yang diberikan kepada aparat kepolisiannya serta sifat organisasinya.
2. Perkembangan pertumbuhan serta tradisi dari kepolisian masing-masing.
3. Lingkungan masyarakat serta kebudayaannya.

Faktor-faktor tersebut akan turut menentukan identitas kepolisian masing-masing, sehingga karena perbedaan faktor-faktor tersebut, tak mungkinlah untuk meniru dan mengetrapkan identitas kepolisian negara lain. Polisi Inggris yang selalu digambarkan sebagai Polisi yang paling ideal, tak mungkin dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai Polisi negara lain, apalagi untuk ditiru identitasnya. Polisi di Amerika Serikat yang dibentuk dengan meniru pola pembentukan Polisi Inggris, mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda.

Di samping itu kita juga bisa menganalisa identitas kepolisian untuk membedakannya dengan aparat Pemerintah lainnya. Dalam hal ini faktor yang paling menentukan perbedaannya adalah sifat tugasnya yang berlainan. Adapun 3 faktor yang disebut terdahulu, mempunyai efek yang hampir sama pada pembentukan identitas

semua aparat pemerintah, dengan perbedaan penonjolan beberapa aspek dari masing-masing faktor yang mempunyai pengaruh khas terhadap aparat tertentu yang dikarenakan sifat tugasnya.

Maka dapat dipastikan, bahwa faktor-faktor determinan dalam penentuan identitas kepolisian dari suatu negara, dalam hal ini konkritnya Polri, adalah:

I. Faktor determinan yang bersifat formal:

1. Negara, dengan falsafah, Undang-Undang Dasar serta produk perundang-undangannya.
2. Sifat organisasi kepolisian itu sendiri.
3. Tradisi kepolisian yang terbentuk selama pertumbuhannya.

II. Faktor yang non-formal ialah

4. Masyarakat atau lingkungannya.

Masing-masing faktor tidak berdiri sendiri, namun berfungsi secara integral dalam penentuan identitasnya. Dengan mengenal ke-4 faktor determinan tersebut, maka menganalisa identitas kepolisian RI harus disemak pertumbuhan identitasnya sejak kepolisian menjadi Polisi Nasional dari Negara Republik Indonesia, yang secara formal ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Jawatan Kepolisian Negara. Sejak itu Polri mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menentukan ciri-ciri khasnya, yang pasti akan berbeda sekali dengan ciri-ciri khas Polisi pendudukan militerisme Jepang dan Polisi kolonial zaman penjajahan Belanda, malahan pasti juga berbeda dengan lembaga Bhayangkara pada zaman kerajaan feodal absolutisme Mojopahit.

Kenyataan menunjukkan, bahwa perkembangan Polri dimulai dengan modal personil yang ditinggalkan oleh Polisi Jepang, yang terdiri dari kader-kader Polisi ex-lulusan pendidikan Polisi Belanda seperti dari Kursus Komisaris, Inspektur, Hoofdagent dan Agen Polisi, dan personil lulusan pendidikan Polisi Jepang dari kursus Cililitan, Kotoka dan Futsuka. Waktu Jepang kalah menyerah dalam tahun 1945, ia meninggalkan aparat Polisi yang relatif masih utuh, baik personil, persenjataan maupun organisasinya. Karena itu Polisi pada saat Proklamasi kemerdekaan merupakan modal utama kekuatan fisik negara kita, dan sebagai kekuatan

pisik yang bersenjata langsung melibatkan diri dalam perjuangan mempertahankan negara melawan pasukan Inggris dan Belanda.

Justru perjuangan ini lebih diutamakan dari pada pelaksanaan tugas rutin kepolisian. Pada masa perjuangan fisik ini dihidupkan kembali lembaga-lembaga pendidikan kepolisian, di antaranya dengan didirikannya Akademi Polisi/PTIK dan Sekolah Inspektur Polisi di Mertoyudan (Yogya) pada tahun 1946. Banyak di antara Mahasiswa Akademi Polisi (Angkatan I dan II) dan para siswa Inspektur (Angkatan I dan II) turut aktif dalam perjuangan fisik, baik waktu menghadapi agresi militer Belanda ke I dan ke II, maupun waktu menghadapi pemberontakan PKI tahun 1948. Perjuangan fisik sebagai Polisi nasional yang membela falsafah dan konstitusi Negara ini juga ditunjukkan setelah tahun 1950 dalam menghadapi pemberontakan-pemberontakan DI/TII, Permesta dan gerakan-gerakan separatis lainnya. Dengan perjuangan fisik ini Polri membentuk suatu identitas kepolisian yang baru, yang tidak semata-mata berperan dalam fungsi kepolisian yang tradisional, tetapi terutama menampakkan diri sebagai alat perjuangan, yang harus tampil ke depan apabila negara terancam eksistensinya.

Namun di samping perjuangan fisik ini, Polri juga telah berjuang untuk mendapatkan status yang dianggapnya layak dalam suatu negara yang merdeka. Perjuangan ini dilakukan setelah tahun 1950, di mana Polri dengan dukungan organisasi Persatuan Pegawai Polisi, berusaha untuk mendapatkan tempat dalam tata susunan aparat Pemerintah, yang berlainan dengan tempat yang lazim diduduki kepolisian di negara manapun, ataupun yang pernah didudukinya dalam sejarah kepolisian di negeri ini. Polri pernah mengalami status ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri, kemudian kembali membawah kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung, dan akhirnya pada tahun 1959 dengan Keppres 154/1959 berdiri sendiri dengan dibentuknya Kementerian Kepolisian. Status tersebut kemudian berubah lagi dengan keluarnya TAP MPRS No. 11/1960 dengan pengintegrasian Polri dalam ABRI, yang berlaku sampai sekarang.

Di dalam perjuangan fisik dan perjuangan status tersebut, para Perwira ex-Pendidikan Belanda dan Jepang memegang peranan yang sangat penting. Demikian pula para siswa dan mahasiswa kepolisian dari lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan se-

belum dan sesudah tahun 1950, melakukan peranan yang sangat aktif; antara lain majalah perjuangan Persatuan Pegawai Polisi, maupun majalah Bhayangkara, sebagai media untuk memperjuangkan pemikiran-pemikiran baru mengenai kepolisian, dipercayakan kepada para mahasiswa PTIK untuk mengemudikannya.

Dari sejarah singkat perkembangan Polri yang diuraikan di atas dapat disimpulkan, bahwa tumbuh suatu identitas Polri yang nampak pada statusnya dalam lingkup organisasi Angkatan Bersenjata, dan mengemban tugas turut dalam usaha pembelaan dan pertahanan negara, di samping tugasnya sebagai aparat keamanan. Di samping itu ditimbulkan suatu tradisi idealisme, ialah perjuangan yang didasarkan atas jiwa pengabdian dan pengorbanan, dalam pengamalan baktinya kepada negara dan masyarakat.

Tidak mengherankan, bahwa pada saat itu mulai berkembang pemikiran untuk meletakkan sendi-sendi tersebut dalam suatu bentuk yang dapat dipakai sebagai dasar pedoman hidup anggota kepolisian. Maka lahirlah *Tribrata*, yang pertama-tama diperkenalkan kepada anggota kepolisian dan masyarakat dalam pembayaran mahasiswa PTIK Angkatan ke II pada tahun 1954 sebagai "kaul" dalam menghadapi tugas yang mereka akan pikul. *Tribrata* ini kemudian diresmikan sebagai pedoman hidup anggota Polri pada peringatan pertama Hari Kepolisian pada tanggal 1 Juli, 1955. Pedoman hidup kepolisian ini kemudian dilengkapi dengan pedoman karya yang berbentuk *Catur Prasetya*, yang diresmikan pada Hari Kepolisian tanggal 1 Juli 1960.

Dalam ungkapan perkembangan Polri sebagai Polisi nasional dalam ketata negaraan RI yang menumbuhkan tradisi kepolisian di atas, sebenarnya telah tersirat gambaran hubungannya dengan masyarakat. Telah diketahui, bahwa proklamasi kemerdekaan merupakan kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia, di mana tekad membentuk satu bangsa yang tercetus dalam tahun 1928, dikonkritisir dengan suatu ikatan negara yang merdeka dan berdaulat penuh di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Tak mengherankan, bahwa tekad hidup sebagai satu bangsa yang merdeka, oleh percikan api kemerdekaan, mengobarkan semangat perjuangan rakyat untuk menentang kembalinya kekuasaan asing.

Maka keberhasilan perjuangan fisik alat-alat bersenjata, termasuk kepolisian, dan badan-badan perjuangan dalam membela

menegakkan kedaulatan Pemerintah RI, adalah atas bantuan dan partisipasi seluruh rakyat atas dasar kesamaan nasib dalam sejarah penindasan kekuasaan asing, dan rasa kesamaan dalam aspirasi menghadapi hari depan. Pengalaman perjuangan fisik bersenjata menimbulkan kesadaran dan keyakinan, bahwa angkatan bersenjata tak bisa dipisahkan dari rakyat sebagai asalnya, dan sebagai sumber kekuatan dan kawan dalam usaha keberhasilan. Hal ini menguatkan kesadaran tanggung jawab Angkatan Bersenjata RI terhadap commitment-nya untuk mengabdikan kepada masyarakat dalam mencapai aspirasinya, dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mencapai keberhasilan.

Uraian di atas secara sekilas lintas memberikan gambaran tentang faktor-faktor Negara, tradisi lembaga dan masyarakat dalam proses pembentukan identitas Polri. Seperti disinggung di atas, sebenarnya ke 3 faktor tersebut berperan dalam pembentukan identitas setiap lembaga pemerintahan, namun hasilnya akan berbeda-beda, karena akan diwarnai oleh perbedaan sifat organisasi/ lembaga serta sifat tugasnya. Faktor inilah yang paling dominan dalam menentukan perbedaan identitas masing-masing.

Di antara tugas-tugas kepolisian terdapat tugas yang bersifat tradisional dan berlaku universal, ialah melindungi hak yang paling mendasar dari setiap orang, ialah hak akan hidupnya dan harta miliknya. Ini merupakan hakekat tugas kepolisian yang universal, yang meliputi perlindungan atas keselamatan jiwa dan badannya, hak-hak konstitusionalnya serta harta miliknya. Di samping itu kepada aparat kepolisian bisa diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan sifat dari negara dan tujuan yang hendak dicapai, dan peranan yang diberikan kepadanya. Karena perbedaan dalam sifat dan tujuan negara serta lingkungan masyarakat, maka peranan alat kepolisiannya masing-masing tentu berbeda, yang menimbulkan banyaknya perumusan tentang peranan kepolisian. Bagi suatu pemerintahan penjajahan atau yang bersifat otoriter, peranan aparat kepolisiannya terutama adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan pemerintahnya. Bagi pemerintahan yang menganut paham demokrasi, terdapat kesamaan dari sifat perannya, karena Polisi merasa bersumber dari masyarakat yang memegang kedaulatan. Hal ini tercermin dalam Code Etik yang ber-

laku dalam kepolisian di Amerika Serikat (Law Enforcement Code of Ethics), atau dalam Code Etik Polisi Inggris (The Nine Principles of the British Police atau pernah diungkapkan oleh salah seorang Kepala Polisi Kerajaan Belanda yang menyatakan, bahwa:

“De Politie moet stevig geworteld zijn in de samenleving, en niet er naast of erboven staan”.

yang berarti, bahwa Polisi harus berakar kuat di dalam masyarakat, dan tidak berdiri di samping atau di atasnya. Meskipun demikian terdapat berbagai rumusan tentang peranannya, di antaranya: yang dititik beratkan kepada perlindungan hak-hak azasi warganya, atau yang ditujukan untuk memelihara kedamaian kehidupan penduduknya (peace keeping), atau perumusan yang luas: untuk memungkinkan kehidupan demokrasi. Peranannya juga bisa dirumuskan berdasarkan salah satu aspek tugas atau sifat lembaganya yang dianggap terpenting, misalnya: sebagai penegak hukum, atau yang memberi kekuatan (force) dan yang menginterpretasikan hukum, atau yang dapat memakai kekerasan sebagai keharusan dari situasi darurat yang timbul. Ada pula pendapat yang menyatakan, bahwa tak mungkin merumuskan peranan Polisi yang standard karena sifatnya yang sangat multikompleks.

Bagaimana peranan Polri dirumuskan yang relevan dengan maksud uraian dalam naskah ini.

Dalam uraian di atas telah disinggung tugas-tugas Polri yang:

1. Bersifat universal, ialah melindungi hak hidup dan keselamatan warga masyarakat serta hak miliknya yang dijamin oleh undang-undang.
2. Bersifat ideal, ialah mengemban tugas sebagai commitment-nya terhadap masyarakat dalam mencapai aspirasinya.
3. Bersifat historis, sebagai alat perjuangan yang turut serta di dalam membela dan mempertahankan negara.

Dalam lingkup penugasan tersebut, maka peranan Polri dapat dirumuskan sebagai:

Melindungi hak-hak warga masyarakat dalam kehidupan demokrasi Pancasila, agar usaha pencapaian cita-cita (aspirasi) masyarakat tidak mendapatkan gangguan.

NO. 03 DESEMBER 82

Berdasarkan analisa tugas dan perumusan peranannya tersebut, maka lembaga Polri sebagai suatu susunan (organisasi) mutlak harus mempunyai sifat-sifat yang efektif, dalam arti harus berhasil di dalam menjalankan tugasnya.

Untuk menunjang sifat efektivitas, maka melekat sifat-sifat lain sebagai pelengkap, ialah:

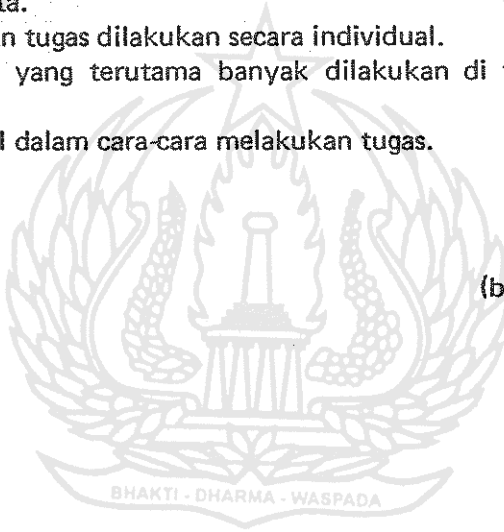
1. Memiliki kekuasaan kepolisian (Police Power), yang bersumber pada:
 - a. Pemberian wewenang kepolisian berdasarkan undang-undang, yang lingkupnya dapat membatasi hak-hak konstitusi warga masyarakat, dan dapat menentukan nasibnya.
 - b. Diberikan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan/paksa berdasarkan undang-undang.
 - c. Dilengkapi dengan sarana fisik berupa peralatan dan senjata api, untuk menghadapi tugas yang banyak mengandung ketidakpastian (resiko) dan bahaya.
2. Untuk pencapaian efektivitas dan karena kelengkapan senjata api, maka susunan organisasinya bersifat militer dengan segala efeknya.
3. Efektivitas hanya tercapai apabila pelaksanaan tugas dilakukan dengan pendekatan operasional, dengan:
 - a. Dapat melibatkan semua anggota dalam kegiatan operasional, untuk mana setiap anggota diberikan kewenangan umum kepolisian berdasarkan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
 - b. Pelaksanaan tugas secara operasional di lapangan lebih banyak harus dilakukan secara individual, di mana anggota tingkat bawahan akan lebih banyak memegang peranan, dengan kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata, yang disebut dengan istilah "diskresi".
 - c. Pelaksanaan tugas operasional di lapangan secara individual hanya akan berhasil, apabila masing-masing anggota menguasai teknik-teknik khas kepolisian atau teknik-teknik profesi.

Secara singkat, sifat-sifat khas yang melekat pada organisasi kepolisian karena sifat tugasnya, adalah:

BHAYANGKARA

1. Efektivitas.
2. Adanya kewenangan kepolisian yang luas.
3. Dapat menggunakan kekerasan/paksa.
4. Dipersenjatai.
5. Sifat militer dalam susunan organisasinya.
6. Pendekatan operasional dalam tugas.
7. Adanya pelimpahan kewenangan umum kepolisian kepada setiap anggota.
8. Pelaksanaan tugas dilakukan secara individual.
9. "Diskresi" yang terutama banyak dilakukan di tingkat bawah.
10. Profesional dalam cara-cara melakukan tugas.

(bersambung)





Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority: still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority.

(lord action)
1887